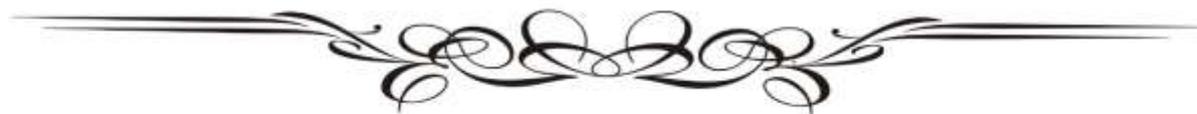


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 9 Januari 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo	Rabu, 9 Januari 2019	Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilanjutkan	Setelah dihentikan sementara pada libur Natal dan akhir tahun
2	Kompas, (Halaman, 14)	Rabu, 9 Januari 2019	Tol Bakauheni-Terbanggi Segera Dioperasikan	Pemerintah telah menyiapkan ruas ajalan Tol Trans-Sumateras agar dapat beroperasi dalam waktu dekat
3	Kompas, (Halaman, 16)	Rabu, 9 Januari 2019	Fungsi Musi IV Masih Terkendala Akses	Jembatan Musi IV diharapkan mampu mengurangi beban jembatan Ampera hingga 40%
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Rabu, 9 Januari 2019	Pemprov Akomodir North South Link	Tol yang menjadi penghubung Bandung Utara dan Bandung Selatan
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 9 Januari 2019	Pemkot Klaim Kemacetan Ampera Turun 40%	Pasca pembukaan Jembatan Musi IV sebagai alternatif jembatan penyebrangan Kawasan Sebrang Ulu dan Ilir
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 9 Januari 2019	Tata Ruang Harus Adopsi Kearifan Lokal	Pembangunan saat ini dinilai masih bertumpu pada sektor ekstraktif, monokultur, skala besar dan polutif.

Judul	Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilanjutkan	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Koran Tempo		
Resume	Setelah dihentikan sementara pada libur Natal dan akhir tahun		

Proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilanjutkan

ANTARA FOTO/RISKY ANDRIANTO



Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, 23 Desember lalu.

JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melanjutkan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated setelah sempat dihentikan sementara demi kelancaran transportasi libur akhir tahun. Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, mengatakan konstruksi proyek sudah mencapai 62 persen. "Fokus pekerjaan sekarang pada pengangkatan *steel box girder* (SBG), serta pengecoran slab atau badan jalan," ucap Djoko, kemarin.

Pengerjaan jalan tol sepanjang 36,4 kilometer itu dibekukan selama total enam hari pada masa Natal dan tahun baru, meski tak beruntun. Menurut Djoko, hanya tersisa sekitar 1.200 buah SBG yang perlu dipasang.

Kontraktor jalan tol layang Jakarta-Cikampek, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selanjutnya perlu merampungkan pekerjaan minor dan kelengkapan jalan, seperti lampu dan drainase. Apalagi konstruksi ditargetkan beres pada Maret mendatang, sebelum difungsikan untuk jalur mudik tiga bulan setelahnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sugiyartanto, sebelumnya mengatakan pembangunan jalan tol layang tersebut akan lebih efektif seiring pembagian waktu kerja dengan proyek di sekitarnya. Saat ini, lokasi pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated bersinggungan dengan dua proyek strategis lainnya, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta rel ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. ● YOHANES PASKALIS PAE DALE

Judul	Tol Bakauheni-Terbanggi Segera Dioperasikan	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Kompas, (Halaman, 14)		
Resume	Pemerintah telah menyiapkan ruas ajalan Tol Trans-Sumateras agar dapat beroperasi dalam waktu dekat		

Tol Bakauheni-Terbanggi Segera Dioperasikan

Pemerintah menyiapkan ruas Jalan Tol Trans-Sumatera agar beroperasi dalam waktu dekat. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, di Jakarta, Selasa (8/1/2019), mengatakan, ruas jalan tol yang direncanakan beroperasi dalam waktu dekat adalah Bakauheni-Terbanggi Besar. Sebab, dari total panjang 140,9 kilometer (km), 14,54 km di antaranya sudah dioperasikan awal 2018. "Ruas itu sudah siap. Mungkin bisa bulan ini," ujarnya. Jalan Tol Trans-Sumatera yang tengah dikebut penyelesaiannya adalah ruas antara Bakauheni sampai Palembang dengan total panjang 359 km. Diawali ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas lain yang ditargetkan beroperasi April 2019, antara lain, adalah Terbanggi Besar-Pematang Panggang (112 km). (NAD)

Judul	Fungsi Musi IV Masih Terkendala Akses	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Kompas, (Halaman, 16)		
Resume	Jembatan Musi IV diharapkan mampu mengurangi beban jembatan Ampera hingga 40%		

INFRASTRUKTUR JEMBATAN

Fungsi Musi IV Masih Terkendala Akses

PALEMBANG, KOMPAS — Hampir empat tahun dibangun, Jembatan Musi IV yang menghubungkan kawasan Ilir Timur dengan Seberang Ulu II di Palembang, Sumatera Selatan, mulai dilewati warga, Selasa (8/1/2019). Jembatan diresmikan Wali Kota Palembang Harnojoyo.

Jembatan sepanjang 1.130 meter itu diharapkan mengurangi beban di Jembatan Ampera hingga 40 persen. Hanya saja, kemacetan masih menjadi masalah karena akses jalan menuju jembatan sempit lantaran belum bebasnya lahan.

Kemarin, setelah dibuka, warga langsung melewati jembatan, baik dari hulu ke hilir atau sebaliknya maupun untuk berswafoto.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang Saiful Anwar menjelaskan, Jembatan Musi IV merupakan proyek APBN senilai Rp 553 miliar dengan pembiayaan tahun jamak periode 2015-2018. Sebelum digunakan, uji beban dan uji coba lalu lintas dilakukan.

Jembatan Musi IV dibangun dengan konsep *extradosed*, teknologi perpaduan antara kabel dan gelagar kotak. Untuk memastikan kondisi jembatan tetap baik, disematkan teknologi pemantau struktur jembatan secara waktu nyata. "Di Jembatan Musi IV, pemasangan alat sudah saat pembangunan," katanya.

Saiful mengatakan, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan masalah jalan akses menuju jembatan yang belum rampung, terutama di Jalan KH Azhari. Semestinya, jembatan terhubung jalan nasional Jalan Ahmad Yani. Namun, karena lahan belum bebas, pembangunan jalan akses terhenti.

Saat ini, di kawasan hulu, pengendara harus melalui Jalan KH Azhari selebar 4,5 meter. Lebar jembatan 14 meter sehingga terjadi penumpukan arus. Berdasarkan perhitungan, pembangunan fisik jalan akses butuh Rp 36 miliar.

Kepala Kepolisian Resor Kota Palembang Komisaris Besar Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, dalam uji coba lalu lintas lima hari sebelum pembukaan, terjadi kemacetan di Jembatan Musi IV pada jam kerja dan pulang kerja. "Apalagi kawasan ini kawasan strategis, ada pelabuhan dan aktivitas niaga," ucapnya.

Untuk mengantisipasi kemacetan di Musi IV, polisi menyiapkan 12 personel untuk mengatur lalu lintas saat kemacetan. Mereka bertugas merekayasa lalu lintas mulai dari pengalihan jalur hingga buka tutup jalan jika dibutuhkan.

Jalan akses

Terkait pembangunan jalan akses, Harnojoyo mengatakan, pembebasan lahan masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menganggarkan dana.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan Darma Budhi menerangkan, sudah disiapkan dana pembebasan lahan Rp 22 miliar, tetapi biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 60 miliar. "Pemetaan lahan sudah dua tahun lalu, kemungkinan harga naik lagi," ujar Darma.

Darma menjelaskan, permasalahan lahan juga menjadi kendala pada pembangunan Jembatan Musi VI yang menghubungkan kawasan Ilir Barat dan Seberang Ulu I. Awal tahun 2019, pembangunan jembatan itu dihentikan untuk sementara karena keterbatasan anggaran. "Pengerjaan Jembatan Musi VI kemungkinan baru akan dilanjutkan Agustus 2019 pada APBD Perubahan," ucap Darma.

Pemerintah juga berencana membangun dua jembatan lagi dengan APBN, yakni Jembatan Musi III dan Musi V. Hanya saja, pembangunan kedua jembatan baru bisa dipastikan pada APBN 2020. (RAM)

Judul	Pemprov Akomodir North South Link	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Tol yang menjadi penghubung Bandung Utara dan Bandung Selatan		

► JALAN TOL DALAM KOTA BANDUNG

Pemprov Akomodir North South Link

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasukkan ruas jalan tol baru Pasirkoja—Surapati Bandung atau North South Link (NS Link) ke dalam revisi tata ruang Jawa Barat.

redaksi@bisnis.com

Sekada Jabar Iwa Kamsiwa mengatakan, jalan tol yang diinisiasi oleh PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. (CMNP) melalui BUMD PT Jasa Sarana tersebut sudah diakomodir dalam revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar.

"Sudah masuk revisi, sekarang masih kami bahas dengan DPRD Jabar," katanya di Bandung, Senin (7/1).

Menurutnya, ruas yang merupakan sambungan dari jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soreja) tersebut akan didorong oleh Pemprov Jabar guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% setiap tahun, khususnya di Kota Bandung.

Setelah proses di dewan selesai, perwujudan jalan tol yang disebut NS Link itu akan disodorkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dievaluasi.

"Dari kita mungkin dipersiapkan saja, karena ini tiga pihak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Peme-

► Pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.

rintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya," katanya.

Meskipun NS Link inisiasi swasta, sambungannya, tahapan pembangunan jalan tol yang akan menelan biaya Rp8,49 triliun ini harus melalui PUPR. Hal itu karena Kementerian PUPR akan menetapkan Badan Pengelola Jalan Tol tersebut. "Ini murni swasta, nanti akan kami pikirkan dari BUMD apakah bisa ikut," ujarnya.

Iwa memastikan bahwa dalam revisi RTRW Jabar, pembangunan jalan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.

"Pembangunan BIUTR masih dalam tahapan merancang nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung mengenai sharing budget pembatasan lahan BIUTR," ungkapnya.

Menurutnya, Japan International Cooperation Agency (JICA) baru bisa melanjutkan komitmen pembiayaan pembangunan BIUTR jika MoU para pemangku kepentingan sudah tuntas.

Iwa mengatakan, MoU tersebut secara patinya ditandatangani pada tahun ini untuk mempercepat pembangunan BIUTR di Kota Bandung yang membentang dari Pasteur hingga Gedebage. "Kami targetkan dalam tahun ini bisa selesai," tegasnya.

KELANCARAN MEGAPOLITAN

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga memastikan bahwa



TOL PENGHUBUNG BANDUNG UTARA & BANDUNG SELATAN

Ruas tol baru Pasirkoja-Surapati Bandung atau North South Link (NS Link) masuk dalam revisi tata ruang Jawa Barat. Jalan tol yang diinisiasi oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) melalui BUMD PT Jasa Sarana tersebut sudah diakomodir dalam revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar.

Seksi 1	: Pasirkoja-Moh.Toha 7,60 Km
Seksi 2	: Moh.Toha-Gatot Subroto 3,60 Km
Seksi 3	: Gatot Subroto-Surapati 3,10 Km
Total Panjang	: 14,30 Km
Konsep	: Elevated di atas lahan Pemprov 75.000 meter persegi
Total Investasi	: Rp8,491 Triliun
Target awal konstruksi	: Triwulan IV 2019
Badan Usaha	: CMNP dan PT Jasa Sarana

(Sumber: Jabar, 2018)

0800/7000000000

jika proyek tol NS Link tersebut akan dilanjutkan karena merupakan bagian dari rencana induk kelancaran lalu lintas Metropolitan Bandung Raya.

"Jadi, kelancaran kota metropolitan itu terbagi dua, memperbanyak jalur baru serta memperbanyak transportasi publik," ujarnya.

Menurutnya, karena jalan tol ini dibangun di lahan Pemprov Jabar, maka

pilihannya akan memerintahkan PT Jasa Sarana ikut terlibat kendati dana swasta yang akan dikucurkan. "Itu lahan pemprov, hanya lokasinya di Bandung, maka Jasa Sarana yang akan mengerjakan," tuturnya.

Terkait dengan teknis pengerjaan jalan tol yang akan banyak menggali lerowongan, dia menyatakan bahwa belum mendapat laporan mengenai hal itu. Namun, karena

proyek ini dibutuhkan maka provinsi akan terus mendorong. "Kalau teknis karena dia [tol] ke pusat kota harus naik turun. Itu nanti kita bahas secara teknis yang penting everybody happy," paparnya.

Ridwan juga memastikan pembangunan tol akan seiring dengan penyediaan transportasi publik salah satunya LRT Bandung Raya.

"Masyarakat jangan keliru, seolah ada jalan tol kota tapi publik transport tidak. Dua-duanya diprioritaskan cuma mana saja yang siap duluan kita kerjakan," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan jalan tol dalam kota, baik NS Link maupun BIUTR, termasuk reaktivasi jalur kereta Bandung-Ciwidey, dan light rail transit (LRT) dari Terminal Kereta Cepat di Tegalluar ke Kota Bandung, dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas warga di Bandung Raya.

"Itu untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, yang pada malam hari jumlahnya 2,5 juta orang, sedangkan pagi hari 3,7 juta orang, karena arus penduduk dari sekitarnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggeser alokasi bantuan keuangan ke daerah senilai Rp800 miliar di APBD 2019 ke pos belanja modal pemprov.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, permintaan menggeser pos di APBD 2019 tersebut baru bersifat masukan tertulis lewat surat resmi Kemendagri.

"Wacana ini bisa [menggeser] sekitar Rp800 miliar," katanya di Bandung, Senin (7/1).

Menurutnya, usulan penggeseran program strategis gubernur sebanyak 40 program infrastruktur pariwisata daerah tersebut dilandasi alasan jika proyek bisa dikerjakan langsung oleh provinsi meski asetnya milik kabupaten/kota. 0800

Judul	Pemkot Klaim Kemacetan Ampera Turun 40%	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pasca pembukaan Jembatan Musi IV sebagai alternatif jembatan penyebrangan Kawasan Sebrang Ulu dan Ilir		

► JEMBATAN MUSI IV PALEMBANG

Pemkot Klaim Kemacetan Ampera Turun 40%

PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mengklaim bahwa kepadatan kendaraan yang melintas di Jembatan Ampera berkurang hingga 40% pasca pembukaan Jembatan Musi IV.

Jembatan Musi IV kini menjadi akses alternatif bagi pengendara yang menuju Kawasan Seberang Ulu dan Ilir di kota itu yang selama ini bertumpu pada Jembatan Ampera.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan bahwa penurunan kepadatan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil survei Dinas Perhubungan Kota Palembang.

"Dari hasil survei tersebut kemacetan di Ampera berkurang 40% setelah selesai uji coba, meskipun timbul masalah baru di Jalan K.H Azhari karena penyempitan jalan tetapi [Pembangunan akses] Jembatan Musi IV ini belum selesai masih berlanjut," katanya di sela *soft launching* Jembatan Musi IV, Selasa (8/1).

Berdasarkan salah satu kajian Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, lalu lintas harian (LHR) Jembatan Ampera sudah cukup

tinggi, yakni rata-rata 352,12 satuan mobil penumpang (SMP). Dengan asumsi kecepatan kendaraan yang melewati jembatan adalah 20 kilometer per jam, terdapat lima kendaraan per lima detik yang melintas di jembatan tersebut.

Harno mengatakan, pihaknya telah berupaya keras merealisasikan Jembatan Musi IV setelah selama 36 tahun terakhir, akses penghubung Kawasan Seberang Ulu dan Ilir hanya melalui dua jembatan, yakni Ampera dan Musi II.

"Tidak mudah dapatkan jembatan ini. Jembatan Ampera dibuat pada 1962, dan selama 20 tahun kemudian baru ada Jembatan Musi II dan baru bisa tambah satu jembatan lagi pada 2018," katanya.

Harno menjelaskan, dalam rencana Pemkot Palembang, akses Jembatan Musi IV menggunakan konsep jalan lingkaran dalam. Nantinya, Jembatan Musi IV yang saat ini berujung di Jalan K.H Azhari di Kawasan Seberang Ulu itu akan tersambung ke Jalan Ahmad Yani yang lebih lebar karena berstatus jalan nasional.

"Bahkan nanti jalan lingkaran

dalam itu akan tembus ke Tol Palindra (Palembang—Indralaya) dan Kapal Betung (Kayuagung—Palembang—Betung)," ungkapnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, kata Harno, saat ini pembebasan lahan di Jalan Ahmad Yani masih terus dikebut. Pemkot juga meminta bantuan Pemprov Sumatera Selatan untuk pembayaran ganti rugi lahan masyarakat.

"Kami dorong percepatan pembebasan lahan, kalau bisa selesai akhir tahun supaya kemacetan baru di Jalan K.H Azhari bisa terurai," katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Ki Agus Syaiful Anwar menambahkan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp36 miliar dari APBN 2019 untuk pembangunan fisik perluasan akses jalan Musi IV.

"Nanti Balai yang akan periksa semua bukti pembayaran [ganti rugi] apakah sudah bebas belum. Kalau sudah bebas bisa dilaksanakan fisiknya," katanya.

(Dinda Wulandari)

Judul	Tata Ruang Harus Adopsi Kearifan Lokal	Tanggal	Rabu, 9 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Pembangunan saat ini dinilai masih bertumpu pada sektor ekstraktif, monokultur, skala besar dan polutif.		

► MITIGASI BENCANA

Tata Ruang Harus Adopsi Kearifan Lokal

JAKARTA — Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi ulang tata ruang dengan memasukkan perspektif kerawanan bencana alam maupun ekologis serta memperhatikan kearifan lokal.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati memaparkan bahwa saat ini pembangunan masih bertumpu pada sektor ekstraktif, monokultur, skala besar, dan polutif. Hal itu, menurutnya, menambah kerawanan bencana akibat hilangnya fungsi-fungsi ekologis ekosistem.

"Contoh terbaru dari pengabaian kearifan lokal dalam perencanaan wilayah adalah dua lokasi likuifaksi di Palu, yang secara tradisional lokasi tersebut merupakan ruang konservasi air," ungkapnya, Senin (7/1).

Selain kearifan lokal, Dahniar Adriani, Direktur Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat Indonesia (Huma) menambahkan, penelitian ilmiah, seperti Peta Zona Bahaya likuifaksi yang dilakukan oleh Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan Badan Geologi yang diserahkan kepada pemerintah daerah pun dilaikan.

Adapun, sorotan mengenai proses mitigasi bencana juga dirasa minim. Dalam diskusi bertajuk *Audit Bencana dan Ekologis dalam Tata Ruang* yang digelar Huma pada Minggu (6/1), pemerintah diminta untuk kembali melakukan evaluasi tata ruang dengan memasukkan perspektif kerawanan bencana alam maupun ekologis serta memperhatikan kearifan lokal.

Dorongan evaluasi tersebut turut didasari oleh sejumlah fakta yang dihadapi seperti konflik sumber daya di dalam ruang yang berujung kepada konflik horisontal pemanfaatan ruang dan dampak dari perubahan iklim semakin sering terjadi.

Selain audit tata ruang, dalam diskusi media itu muncul dorongan kepada pemerintah untuk memasukkan mitigasi bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang nasional dan wilayah ke depan, dengan antara lain memasukkan zonasi rawan bencana sebagai nomenklatur khusus di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemerintah juga diminta melakukan riset tentang pola bencana dan dampaknya sehingga memiliki informasi terkini mengenai pola bencana tersebut dan antisipasi atas bentuk bencana yang baru. Kemudian, menyiapkan materi bencana dan kesiapsiagaan dalam materi pendidikan nasional.

Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana melalui keterbukaan informasi, di antaranya,

informasi mengenai peta-peta detail wilayah rawan bencana alam maupun bencana ekologis, dan meninjau ulang aturan serta standar yang terkait dengan risiko, seperti dalam kode bangunan agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

BELUM SPESIFIK

Pengamat properti sekaligus Vice President Coldwell Banker Dani Indra Bhatara mengungkapkan bahwa memang baru hanya ada aturan ketahanan bencana gempa untuk pembangunan gedung.

"Jika melihat pengalaman untuk gedung bertingkat memang sudah ada aturan terkait ketahanan akan gempa. Sementara itu, untuk bencana lainnya memang belum secara spesifik ada aturannya," kata Dani kepada *Bisnis*, Selasa (8/1).

Kemudian, di dalam aturan pembangunan sebenarnya sudah ada izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Izin tersebut, katanya, sudah masuk ke dalam kepentingan memelihara lingkungan yang diatur oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, untuk hunian tapak sejauh ini belum ada aturan tahan gempa. Akan tetapi, sudah ada standar yang dianjurkan oleh pemerintah dan tertera dalam SNI 1726:2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa hingga saat ini, pembangunan yang dilakukan oleh pengembang sudah sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Ke depan, Khalawi mengaku akan lebih memperketat aturan penetapan permukiman baru berdasarkan peta wilayah potensi bencana.

"Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi rawan bencana, maka penetapan lokasi permukiman baru harus memperhatikan peta wilayah potensi bencana. (Mutia Nabila)

**Suku Bunga Dasar
PT BANK PEMBAN
Per**

Suku Bunga Dasar Kredit

Keterangan :

- a. Suku Bunga Dasar kredit yang akan di komponen estimasi risiko masing-masing bunga kredit yang d
- b. Dalam Kredit Konsum kredit tanpa agunan
- c. Informasi SBOK yang dan / atau website E